

## Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Indonesia

Sri Endang Rahayu<sup>1\*</sup>, Nurhamidah Pulungan<sup>2</sup>, Lailan Safina Hasibuan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 Medan, Sumatera Utara, Indonesia

\*e-mail : [sriendang@umsu.ac.id](mailto:sriendang@umsu.ac.id)

---

### ABSTRAK

#### Artikel Info

**Received :**

24 June 2026

**Revised :**

1 July 2026

**Accepted :**

4 July 2026

Kata Kunci :  
Kemiskinan, Ketimpangan,  
Pertumbuhan Ekonomi,  
Pengangguran, IPM

Keywords:  
*Poverty, Inequality,  
Economic Growth,  
Unemployment, Human  
Development Index*

Kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi tantangan utama dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia. Meskipun berbagai indikator makroekonomi menunjukkan perbaikan, manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia serta mengkaji pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data panel 34 provinsi di Indonesia selama periode 2021–2025 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia mengalami fluktuasi selama periode pengamatan, sementara tingkat kemiskinan cenderung menurun. Secara parsial, variabel Gini Ratio, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun demikian, secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa penurunan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh satu faktor tertentu, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai aspek ekonomi dan sosial yang berlangsung secara bersamaan. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan perlu dirancang secara komprehensif melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

---

### *Analysis of Income Distribution Inequality and Its Impact on Poverty in Indonesia*

---

#### ABSTRACT

*Poverty and income distribution inequality remain the main challenges in Indonesia's economic development process. Although various macroeconomic indicators show improvement, the benefits of development have not yet been fully felt evenly by all segments of society. This research aims to analyze the development of income*

*distribution inequality in Indonesia and examine the impact of income distribution inequality, economic growth, open unemployment rate, and the Human Development Index (HDI) on the poverty rate. The research uses a quantitative approach by utilizing panel data from 34 provinces in Indonesia during the period 2021–2025 obtained from the Central Statistics Agency. The analysis is conducted using panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM) approach. The research results show that income distribution inequality in Indonesia fluctuated during the observation period, while the poverty rate tended to decrease. Partially, the Gini Ratio variable, economic growth, open unemployment rate, and HDI do not have a significant effect on the poverty rate. However, simultaneously, all independent variables have a significant impact on poverty. These findings indicate that the reduction of poverty is not determined by a single factor, but rather is the result of the interaction of various economic and social aspects occurring simultaneously. Therefore, poverty alleviation policies need to be designed comprehensively thru the strengthening of human resource quality, the creation of job opportunities, the equitable distribution of income, and more inclusive economic growth.*

---

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan output dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur melalui tingginya laju pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari kemampuannya dalam mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan distribusi pendapatan. Dalam banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering kali belum diikuti oleh distribusi manfaat pembangunan yang merata sehingga memunculkan ketimpangan sosial ekonomi yang cukup signifikan (World Bank, 2024; United Nations Development Programme [UNDP], 2024).

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga pasca pandemi COVID-19. Namun demikian, berbagai indikator pembangunan menunjukkan bahwa persoalan ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Ketimpangan distribusi pendapatan mencerminkan perbedaan kemampuan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi dan manfaat pembangunan. Ketika ketimpangan meningkat, kelompok masyarakat berpendapatan rendah cenderung memperoleh manfaat yang lebih kecil dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi sehingga berpotensi memperlambat peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh (OECD, 2023; World Bank, 2024).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia yang diukur menggunakan Gini Ratio mengalami dinamika selama periode 2021–2025. Nilai Gini Ratio tercatat sebesar 0,384 pada tahun 2021 dan 2022, meningkat menjadi 0,388 pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 0,379 pada tahun 2024 dan kembali turun menjadi 0,375 pada tahun 2025. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat kecenderungan perbaikan distribusi pendapatan, ketimpangan masih menjadi persoalan struktural yang memerlukan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.

Di sisi lain, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Persentase penduduk miskin yang mencapai 10,14 persen pada tahun 2021 menurun menjadi 9,54 persen pada tahun 2022, kemudian menjadi 9,36 persen pada tahun 2023, 8,57 persen pada tahun 2024, dan 8,25 persen pada tahun 2025. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar menunjukkan bahwa kemiskinan tetap menjadi salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang memerlukan penanganan secara berkelanjutan (BPS, 2025). Kemiskinan merupakan persoalan kompleks, akan terus menjadi persoalan yang aktual dari masa ke masa (Sri Endang Rahayu, dkk, 2020).

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, hubungan antara ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan menjadi salah satu isu yang banyak mendapat perhatian. Ketimpangan yang tinggi dapat mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan karena sebagian besar manfaat pertumbuhan hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengurangan kemiskinan berjalan lebih lambat dibandingkan apabila hasil pembangunan terdistribusi secara lebih merata (Bergstrom & Malmberg, 2022; UNDP, 2024).

Selain ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi juga merupakan faktor yang sering dikaitkan dengan perubahan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara atau wilayah dalam jangka waktu tertentu (Sri Endang Rahayu, dkk, 2015). Secara teoritis, peningkatan aktivitas ekonomi akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja. Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan apabila tidak diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan dan perluasan akses ekonomi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah (Kraay, 2023; OECD, 2023).

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kemiskinan adalah tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran mencerminkan keterbatasan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja yang produktif. Tingginya tingkat pengangguran dapat menurunkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan sehingga meningkatkan risiko terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu strategi penting dalam upaya pengurangan kemiskinan (International Labour Organization [ILO], 2024).

Di samping faktor ekonomi, kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga memperbesar peluang masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan IPM berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial ekonomi dalam jangka panjang (UNDP, 2024; Sethi & Acharya, 2022).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, IPM, dan kemiskinan. Namun demikian, hasil penelitian yang diperoleh masih menunjukkan temuan yang beragam. Sebagian penelitian menemukan bahwa ketimpangan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan pengaruh yang relatif lemah atau tidak signifikan. Perbedaan karakteristik wilayah, periode penelitian, dan metode analisis diduga menjadi faktor yang menyebabkan variasi hasil tersebut (Dian Prehatin & Miftakhul Choiri, 2025; Ananto Wibowo & M. Rismawan Ridha, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia serta menguji pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2021–2025. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan literatur ekonomi pembangunan serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pengurangan kemiskinan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Selain variabel ketimpangan, penelitian ini juga mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai faktor yang diduga turut mempengaruhi kondisi kemiskinan. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengujian hubungan antarvariabel secara objektif melalui analisis statistik berbasis data numerik.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Data mencakup 34 provinsi di Indonesia selama periode 2021–2025 sehingga membentuk data panel yang mengombinasikan dimensi waktu (*time series*) dan dimensi wilayah (*cross section*). Penggunaan data panel memungkinkan analisis yang lebih komprehensif karena mampu menangkap variasi antarprovinsi sekaligus perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan yang diukur berdasarkan persentase penduduk miskin pada masing-masing provinsi. Adapun variabel independen terdiri atas Gini Ratio sebagai indikator ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemilihan variabel tersebut didasarkan pada teori ekonomi pembangunan dan berbagai hasil penelitian empiris yang menunjukkan keterkaitan antara distribusi pendapatan, aktivitas ekonomi, kualitas sumber daya manusia, serta kondisi pasar kerja terhadap tingkat kemiskinan.

Untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap tingkat kemiskinan digunakan model ekonometrik (Hafni, Roswita, 2024) dengan model regresi data panel dengan persamaan sebagai berikut:

$$KM_{it} = \beta_0 + \beta_1 GR_{it} + \beta_2 PE_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \beta_4 IPM_{it} + \epsilon_{it} \dots (1)$$

Keterangan:

KM	= Tingkat kemiskinan (persen per tahun)
GR	= Gini ratio (angka per tahun)
PE	= Pertumbuhan ekonomi (persen per tahun)
TPT	= Tingkat pengangguran terbuka (persen per tahun)
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia (angka per tahun)
i	= Propinsi
t	= Periode pengamatan (2021-2025)
$\beta_0$	= Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien regresi

$\epsilon_{it}$  = error term

Tahapan analisis diawali dengan penyajian statistik deskriptif untuk menggambarkan perkembangan ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode penelitian. Selanjutnya dilakukan estimasi regresi data panel untuk memperoleh model yang paling sesuai dengan karakteristik data.

Penentuan model terbaik dilakukan melalui serangkaian pengujian, yaitu Uji Chow untuk membandingkan *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model*, Uji Hausman untuk memilih antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*, serta Uji Lagrange Multiplier apabila diperlukan untuk membandingkan *Common Effect Model* dengan *Random Effect Model*. Model yang memenuhi kriteria pengujian kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses estimasi.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, model regresi terlebih dahulu dievaluasi melalui pengujian asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan normalitas residual. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa model yang digunakan menghasilkan estimasi yang tidak bias dan dapat diinterpretasikan secara statistik.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F). Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap tingkat kemiskinan secara individual, sedangkan uji F digunakan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Selain itu, koefisien determinasi (*Adjusted R-Squared*) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan antarprovinsi di Indonesia.

Seluruh proses pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik EViews 12 dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen ( $\alpha = 0,05$ ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Analisis Deskriptif Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia

Ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan merupakan dua permasalahan yang saling berkaitan dalam proses pembangunan ekonomi. Ketimpangan yang tinggi dapat mengurangi kemampuan kelompok masyarakat berpendapatan rendah untuk menikmati hasil pembangunan, sehingga berpotensi memperlambat penurunan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, analisis terhadap perkembangan kedua indikator tersebut penting dilakukan untuk memahami dinamika kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

**Tabel 1.** Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia  
Tahun 2021-2025

Tahun	Gini Rasio
2021	0.384
2022	0.384
2023	0.388
2024	0.379
2025	0.375

Sumber : BPS, 2021-2025

Ketimpangan distribusi pendapatan dapat dilihat dari data koefisien gini atau gini ratio, di mana angka gini ratio berkisar dari angka 0 sampai 1. Jika gini ratio mendekati angka nol

artinya semakin merata distribusi pendapatan dan jika gini ratio mendekati angka 1 artinya semakin timpang distribusi pendapatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai Gini Ratio Indonesia selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi namun secara umum mengalami penurunan. Pada tahun 2021 dan 2022 nilai Gini Ratio tercatat sebesar 0,384, kemudian meningkat menjadi 0,388 pada tahun 2023. Selanjutnya nilai tersebut menurun menjadi 0,379 pada tahun 2024 dan kembali turun menjadi 0,375 pada tahun 2025. Bahkan data BPS menunjukkan bahwa pada September 2025 Gini Ratio nasional kembali turun menjadi 0,363. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan distribusi pengeluaran masyarakat dibandingkan periode sebelumnya.

Penurunan ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa manfaat pembangunan ekonomi mulai terdistribusi lebih merata kepada berbagai kelompok masyarakat. Menurut klasifikasi Bank Dunia, semakin kecil nilai Gini Ratio maka semakin rendah tingkat kesenjangan yang terjadi dalam distribusi pendapatan. Dengan demikian, penurunan Gini Ratio selama periode penelitian dapat diartikan sebagai sinyal positif bagi upaya pembangunan yang lebih inklusif.

Di sisi lain, tingkat kemiskinan nasional juga menunjukkan tren yang menurun. Persentase penduduk miskin yang mencapai sekitar 10 persen pada awal periode pengamatan terus mengalami penurunan hingga berada pada kisaran 8 persen pada tahun 2025. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2025, tingkat kemiskinan Indonesia tercatat sebesar 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta jiwa, lebih rendah dibandingkan 8,57 persen pada September 2024. Pada saat yang sama, angka kemiskinan ekstrem juga menurun menjadi 0,85 persen.

**Tabel 2.** Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2021-2025

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)
2021	10.14
2022	9.54
2023	9.36
2024	8.57
2025	8.25

Sumber : BPS, 2021-2025

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbaikan distribusi pendapatan cenderung berjalan seiring dengan penurunan kemiskinan. Secara teoritis, hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui mekanisme distribusi hasil pembangunan. Ketika ketimpangan menurun, kelompok masyarakat berpendapatan rendah memperoleh akses yang lebih baik terhadap kesempatan ekonomi, lapangan kerja, pendidikan, dan layanan publik. Kondisi ini pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Meskipun demikian, penurunan ketimpangan tidak secara otomatis menghilangkan kemiskinan. Data menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan yang cukup besar antarprovinsi di Indonesia. Beberapa provinsi di kawasan timur Indonesia masih memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan wilayah barat Indonesia. Sebaliknya, beberapa provinsi dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi justru masih menghadapi ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup besar. BPS mencatat bahwa pada tahun 2025 tingkat ketimpangan tertinggi terjadi di DKI Jakarta dengan Gini Ratio sebesar 0,441, sedangkan tingkat ketimpangan terendah terdapat di Kepulauan Bangka Belitung sebesar

0,222. Pada periode yang sama, tingkat kemiskinan tertinggi tercatat di Papua Pegunungan sebesar 30,03 persen dan terendah di Bali sebesar 3,72 persen.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan tidak selalu bersifat langsung. Kemiskinan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, kualitas sumber daya manusia, serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam melakukan redistribusi pendapatan. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata.

Secara keseluruhan, perkembangan indikator ketimpangan dan kemiskinan selama periode 2021–2025 menunjukkan arah yang positif. Penurunan Gini Ratio yang diikuti oleh menurunnya persentase penduduk miskin mengindikasikan bahwa proses pembangunan ekonomi Indonesia mulai bergerak menuju pola pembangunan yang lebih inklusif. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antarwilayah yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat.

## Mengestimasi Pengaruh Ketimpangan, Pertumbuhan Ekonomi, TPT dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan

### Hasil Regresi

Berdasarkan tahapan pemilihan model melalui Uji Chow dan Uji Hausman, model yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM). Model ini dipilih karena mampu mengakomodasi karakteristik spesifik masing-masing provinsi yang tidak dapat diamati secara langsung tetapi berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan.

Hasil regresi data panel dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3.** Hasil Regresi Data Panel

Dependent Variable: KM				
Method: Panel Least Squares				
Date: 05/09/26 Time: 12:20				
Sample: 2021 2025				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 34				
Total panel (balanced) observations: 170				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.98284	4.338733	2.761828	0.0066
GR	0.767060	4.483329	0.171092	0.8644
PE	-0.021269	0.033051	-0.643514	0.5210
TPT	-0.006072	0.087728	-0.069212	0.9449
IPM	-0.019962	0.050303	-0.396825	0.6921
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.976371	Mean dependent var	10.62647	
Adjusted R-squared	0.969748	S.D. dependent var	5.211337	
S.E. of regression	0.906416	Akaike info criterion	2.835426	
Sum squared resid	108.4499	Schwarz criterion	3.536369	
Log likelihood	-203.0112	Hannan-Quinn criter.	3.119861	
F-statistic	147.4154	Durbin-Watson stat	2.660864	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : data diolah, 2026

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel tersebut, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$KM = 11,98284 + 0,767060GRit - 0,021269PEit - 0,066072TPTit - 0,019962IPMit \text{ ---- (2)}$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 11,98284 menunjukkan bahwa apabila variabel Gini ratio (GR), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dianggap konstan atau bernilai nol, maka tingkat kemiskinan sebesar 11,98284 persen.

Koefisien regresi variabel gini ratio sebesar 0,767060. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan ketimpangan cenderung diikuti oleh kenaikan tingkat kemiskinan. Akan tetapi, hubungan tersebut belum cukup kuat secara statistik karena nilai probabilitasnya mencapai 0,8644 atau lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen.

Variabel pertumbuhan ekonomi menghasilkan koefisien sebesar -0,047428. Tanda negatif menunjukkan adanya kecenderungan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berasosiasi dengan penurunan tingkat kemiskinan. Namun demikian, nilai probabilitas sebesar 0,5210 menunjukkan bahwa hubungan tersebut belum signifikan secara statistik.

Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) memperoleh koefisien sebesar -0,006072 dengan nilai probabilitas 0,9449. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan tingkat pengangguran selama periode penelitian tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap variasi tingkat kemiskinan antarprovinsi di Indonesia.

Pada variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), diperoleh koefisien sebesar -0,019962 dengan probabilitas 0,6921. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia cenderung berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan, meskipun hubungan tersebut belum signifikan secara statistik.

Untuk menentukan model terbaik digunakan :

### 1. Uji Chow

**Tabel 4.** Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	81.265897	(33,132)	0.0000
Cross-section Chi-square	520.111636	33	0.0000

Sumber : data diolah, 2026.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai probabilitas Cross-section F sebesar  $0,0000 < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan model yang lebih tepat digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

## 2. Uji Hausman

**Tabel 5.** Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	40.729341	4	0.0000

Sumber : data diolah, 2026.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai probabilitas sebesar  $0,0000 < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak. Dengan demikian, model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM). Dengan demikian, model regresi data panel yang paling sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM).

## Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Multikolinieritas

**Tabel 5.** Uji Mutikolinieritas

Covariance Analysis: Ordinary

Date: 05/09/26 Time: 12:45

Sample: 2021 2025

Included observations: 170

Covariance Correlation	GR	PE	TPT	IPM
GR	0.002183 1.000000			
PE	-0.018216 -0.101529	14.74469 1.000000		
TPT	0.009393 0.131483	-0.602458 -0.102617	2.337658 1.000000	
IPM	0.025885 0.151143	-2.475947 -0.175916	1.790450 0.319487	13.43497 1.000000

Sumber : data diolah, 2026.

Berdasarkan hasil correlation matrix, diketahui bahwa seluruh nilai korelasi antar variabel independen berada di bawah 0,90. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel bebas tidak terlalu tinggi sehingga model regresi tidak mengalami masalah multikolinieritas. Dengan demikian, variabel independen dalam penelitian dapat digunakan secara bersama-sama dalam model regresi.

## 2. Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 6.** Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABSRES  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 05/09/26 Time: 13:21  
 Sample: 2021 2025  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 34  
 Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.465524	2.622657	-1.321379	0.1887
GR	3.408555	2.710061	1.257741	0.2107
PE	0.025124	0.019978	1.257558	0.2108
TPT	-0.037549	0.053029	-0.708081	0.4801
IPM	0.036689	0.030407	1.206595	0.2297

Effects Specification

Sumber : data diolah, 2026.

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh variabel independen memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, yaitu GR sebesar 0,2107, PE sebesar 0,2108, TPT sebesar 0,4801, dan IPM sebesar 0,2297. Hal ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan atau tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

## 3. Uji Autokorelasi

**Tabel 7.** Uji Autokorelasi

Dependent Variable: KM  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 05/09/26 Time: 13:28  
 Sample: 2021 2025  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 34  
 Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.98284	4.338733	2.761828	0.0066
GR	0.767060	4.483329	0.171092	0.8644
PE	-0.021269	0.033051	-0.643514	0.5210
TPT	-0.006072	0.087728	-0.069212	0.9449
IPM	-0.019962	0.050303	-0.396825	0.6921

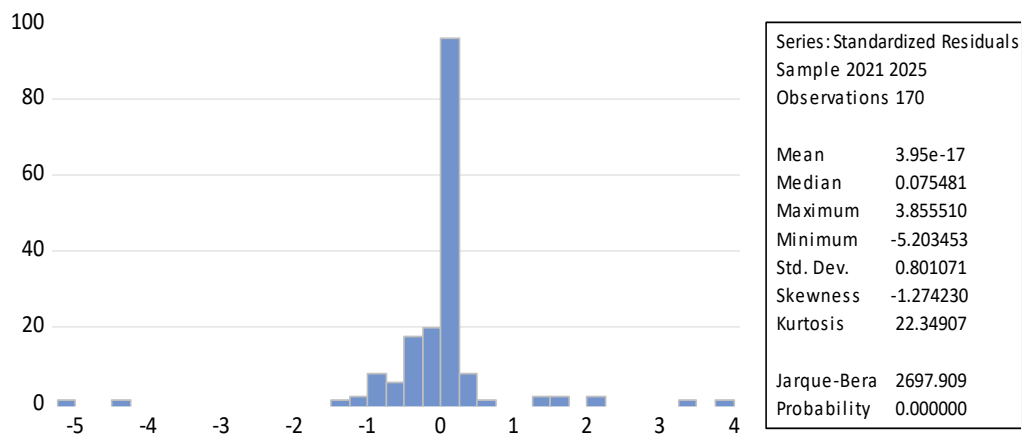
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.976371	Mean dependent var	10.62647
Adjusted R-squared	0.969748	S.D. dependent var	5.211337
S.E. of regression	0.906416	Akaike info criterion	2.835426
Sum squared resid	108.4499	Schwarz criterion	3.536369
Log likelihood	-203.0112	Hannan-Quinn criter.	3.119861
F-statistic	147.4154	Durbin-Watson stat	2.660864
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : data diolah, 2026.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,660864. Nilai tersebut berada di sekitar angka 2 sehingga menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi. Dengan demikian, residual pada model regresi tidak saling berkorelasi antar periode pengamatan.

#### 4. Uji Normalitas



Gambar 1. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,000000 < 0,05 sehingga residual dalam model regresi dinyatakan tidak berdistribusi normal. Namun demikian, penelitian ini tetap dapat dilanjutkan karena jumlah observasi yang digunakan cukup besar yaitu sebanyak 170 observasi. Berdasarkan teori Central Limit Theorem, jumlah sampel yang besar cenderung mendekati distribusi normal sehingga pelanggaran asumsi normalitas masih dapat ditoleransi dalam penelitian data panel.

#### Uji hipotesis

##### 1. Uji t

Tabel 8. Uji t

Dependent Variable: KM  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 05/09/26 Time: 13:32  
 Sample: 2021 2025  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 34  
 Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.98284	4.338733	2.761828	0.0066
GR	0.767060	4.483329	0.171092	0.8644
PE	-0.021269	0.033051	-0.643514	0.5210
TPT	-0.006072	0.087728	-0.069212	0.9449
IPM	-0.019962	0.050303	-0.396825	0.6921

Sumber : data diolah, 2026.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai probabilitas variabel Gini Ratio (GR) sebesar 0,8644, Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebesar 0,5210, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 0,9449, dan IPM sebesar 0,6921. Seluruh nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa secara parsial seluruh variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemiskinan (variabel dependen).

## 2. Uji F

**Tabel 9.** Uji F

R-squared	0.976371
Adjusted R-squared	0.969748
S.E. of regression	0.906416
Sum squared resid	108.4499
Log likelihood	-203.0112
F-statistic	147.4154
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : data diolah, 2026.

Secara individual, keempat variabel independen belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Namun demikian, hasil pengujian simultan memperlihatkan bahwa kombinasi seluruh variabel dalam model mampu menjelaskan variasi tingkat kemiskinan secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu variabel tertentu.

## 3. Koefisien Determinan ( $R^2$ )

**Tabel 10.** Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

R-squared	0.976371
Adjusted R-squared	0.969748
S.E. of regression	0.906416
Sum squared resid	108.4499
Log likelihood	-203.0112
F-statistic	147.4154
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : data diolah, 2026.

Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,9697 menunjukkan bahwa sekitar 96,97 persen variasi tingkat kemiskinan dapat diterangkan oleh variabel ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia yang dimasukkan ke dalam model. Sementara itu, sisanya sebesar 3,03 persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

## Pembahasan

### Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel ketimpangan distribusi pendapatan yang diprosikan dengan Gini Ratio memiliki koefisien sebesar 0,767060 dengan probabilitas 0,8644. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan cenderung diikuti oleh peningkatan tingkat kemiskinan. Namun demikian, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5 persen. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh terhadap kemiskinan tidak dapat diterima.

Secara ekonomi, hubungan positif antara ketimpangan dan kemiskinan menunjukkan bahwa distribusi pendapatan yang semakin tidak merata berpotensi memperbesar jumlah

penduduk miskin. Ketika sebagian besar pendapatan terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu, kelompok berpendapatan rendah memperoleh manfaat pembangunan yang lebih kecil. Akibatnya, kemampuan masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraannya menjadi terbatas sehingga proses pengurangan kemiskinan berjalan lebih lambat.

Meskipun demikian, ketidaksignifikanan variabel Gini Ratio mengindikasikan bahwa perubahan tingkat kemiskinan antarprovinsi di Indonesia selama periode penelitian tidak sepenuhnya ditentukan oleh tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Kondisi ini dapat terjadi karena pemerintah telah menjalankan berbagai program perlindungan sosial, bantuan langsung, subsidi pangan, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mampu menahan dampak ketimpangan terhadap kemiskinan. Selain itu, perbedaan karakteristik ekonomi antarprovinsi juga menyebabkan hubungan antara ketimpangan dan kemiskinan tidak selalu bersifat linier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan ketimpangan belum tentu secara langsung diikuti oleh penurunan kemiskinan dalam jangka pendek. Beberapa provinsi memiliki tingkat ketimpangan yang relatif rendah tetapi masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi akibat rendahnya produktivitas ekonomi, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sebaliknya, terdapat provinsi dengan tingkat ketimpangan yang relatif tinggi tetapi memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah karena didukung oleh aktivitas ekonomi yang lebih maju.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Daole et al. (2026) yang menemukan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan tidak selalu menjadi faktor dominan dalam menjelaskan variasi kemiskinan antarwilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaruh ketimpangan terhadap kemiskinan sering kali dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas sumber daya manusia, struktur perekonomian daerah, dan efektivitas kebijakan perlindungan sosial.

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien sebesar -0,047428 dengan nilai probabilitas 0,5210. Koefisien negatif menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi cenderung menurunkan tingkat kemiskinan. Akan tetapi, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik.

Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia selama periode 2021–2025 belum sepenuhnya mampu menurunkan kemiskinan secara langsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menghasilkan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam beberapa kasus, pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memiliki akses lebih besar terhadap modal, teknologi, dan kesempatan usaha.

Fenomena tersebut dikenal sebagai *non-inclusive growth*, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan hasil pembangunan. Dalam kondisi demikian, peningkatan output ekonomi belum tentu meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi perlu disertai dengan kebijakan yang mendorong pemerataan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja agar dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan menjadi lebih efektif.

Selama periode penelitian, perekonomian Indonesia menunjukkan pemulihan yang cukup baik setelah pandemi. Pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di atas 5 persen dan didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga serta investasi. Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan struktural

seperti ketimpangan wilayah dan keterbatasan akses ekonomi kelompok rentan (Dian Prehatin, & Choiri, M, 2025).

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terbaru yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki arah hubungan negatif terhadap kemiskinan, namun pengaruhnya tidak selalu signifikan apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia dan distribusi pendapatan yang lebih merata (Dian Prehatin, & Choiri, M, 2025).

Hasil ini sejalan dengan pandangan World Bank (2020) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan faktor utama dalam pengurangan kemiskinan. Secara empiris, penelitian Nora Lustig (2020) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan kebijakan redistribusi dapat mempercepat penurunan kemiskinan.

Beberapa studi juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak signifikan terhadap kemiskinan apabila tidak disertai pemerataan. Hal ini sejalan dengan temuan Ravi Kanbur dan Anthony J Venables (2017) yang menekankan pentingnya distribusi yang merata agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif.

### **Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan**

Berdasarkan hasil estimasi, tingkat pengangguran terbuka memiliki koefisien sebesar -0,006072 dengan nilai probabilitas 0,9449. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Secara teoritis, hasil ini berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional yang menyatakan bahwa peningkatan pengangguran akan meningkatkan kemiskinan karena masyarakat kehilangan sumber pendapatan. Namun demikian, kondisi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa hubungan antara pengangguran dan kemiskinan tidak selalu sederhana.

Salah satu penyebabnya adalah karakteristik pasar tenaga kerja Indonesia yang masih didominasi oleh sektor informal. Banyak penduduk yang secara statistik tidak dikategorikan sebagai pengangguran karena tetap bekerja, meskipun produktivitas dan pendapatannya sangat rendah. Dengan kata lain, sebagian masyarakat yang tergolong miskin justru tercatat sebagai pekerja informal sehingga tidak masuk dalam kategori pengangguran terbuka.

Selain itu, berbagai program bantuan sosial yang diberikan pemerintah selama periode penelitian juga berpotensi mengurangi dampak negatif pengangguran terhadap tingkat kemiskinan. Rumah tangga yang kehilangan pekerjaan masih memperoleh dukungan melalui berbagai program perlindungan sosial sehingga risiko jatuh ke dalam kemiskinan dapat ditekan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk yang menganggur, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan sebaiknya tidak hanya berfokus pada penurunan tingkat pengangguran, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang produktif, layak, dan berkelanjutan.

Temuan ini berbeda dengan sebagian besar penelitian yang menemukan bahwa pengangguran merupakan salah satu determinan utama kemiskinan. Namun demikian, beberapa studi panel terbaru di Indonesia juga menunjukkan bahwa pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan dapat melemah setelah mempertimbangkan faktor pembangunan manusia dan karakteristik wilayah (Dian Prehatin, & Choiri, M, 2025).

Temuan ini juga tidak konsisten dengan penelitian OECD (2018) yang menyatakan bahwa pengangguran merupakan salah satu determinan utama kemiskinan. Selain itu, penelitian Hai-Anh Dang dan Peter Lanjouw (2018) menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap pekerjaan meningkatkan kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian OECD (2018), namun sejalan dengan temuan Wibowo dan Ridha (2021) yang menunjukkan bahwa pengangguran tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan setelah mempertimbangkan faktor pembangunan manusia dan karakteristik daerah.

### **Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki koefisien sebesar -0,019962 dengan probabilitas 0,6921. Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa peningkatan IPM cenderung menurunkan tingkat kemiskinan, meskipun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang lebih baik berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih baik umumnya memiliki produktivitas yang lebih tinggi sehingga lebih mudah memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang layak.

Meskipun demikian, ketidaksignifikan variabel IPM menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi penurunan kemiskinan dalam jangka pendek. Hal ini dapat terjadi karena manfaat investasi di bidang pendidikan dan kesehatan umumnya baru dirasakan dalam jangka panjang. Dengan kata lain, peningkatan kualitas manusia memerlukan waktu sebelum berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Walaupun tidak signifikan, arah hubungan negatif yang ditemukan dalam penelitian ini tetap mendukung teori pembangunan manusia yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup merupakan instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan. Temuan ini juga konsisten dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa pembangunan manusia berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kerentanan terhadap kemiskinan.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Widiyanti et al. (2026) yang menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia berpotensi menurunkan kemiskinan melalui peningkatan produktivitas dan akses masyarakat terhadap kesempatan ekonomi yang lebih baik.

Temuan ini juga tidak sejalan dengan penelitian Sabina Alkire dan James Foster (2016) yang menekankan pentingnya dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup dalam mengurangi kemiskinan. Selain itu, penelitian Branko Milanovic (2016) juga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan dan kemiskinan.

### **Simpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti bahwa peningkatan ketimpangan akan meningkatkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menurun pengangguran, maka tingkat kemiskinan semakin meningkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif

namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Impilkasi hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan di Indonesia tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat ketimpangan, pengangguran, dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perlu diarahkan pada: pemerataan distribusi pendapatan, peningkatan kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja, serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Gini Ratio dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Gini Ratio dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Gini Ratio dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Gini Ratio dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Gini Ratio dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2025*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Indonesia 2025*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025*. Jakarta: BPS.
- Bergstrom, K., & Malmberg, B. (2022). Income inequality and poverty dynamics in developing countries. *Journal of Economic Inequality*, 20(3), 421–438.
- Branko Milanovic. (2016). *Global Inequality*. Harvard University Press.
- Daole, A. S. A., Siagian, R. A., Sagala, T. O., Simarmata, Y. V., Sembiring, Y. B., & Sitingjak, M. A. (2026). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara tahun 2005–2024. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 45–58.
- Dian Prehatin, & Choiri, M. (2025). Determinants of poverty levels in Indonesia: The roles of economic growth, human development index, and unemployment. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 4(2), 115–128.
- Hafni, Roswita (2024). *Statistika Ekonomi*, Medan : Perdana Publishing.
- Hai-Anh Dang, & Peter Lanjouw. (2018). Welfare dynamics measurement. *Review of Income and Wealth*, 64(3), 509–531.
- International Labour Organization. (2024). *World Employment and Social Outlook 2024: Trends*. Geneva: ILO.
- Kanbur, R., & Venables, A. J. (2017). Place, people and prosperity. *Oxford Review of Economic Policy*, 33(2), 261–281.
- Kraay, A. (2023). Growth, inequality and poverty reduction in developing economies. *World Development*, 168, 106243.
- Lustig, N. (2020). Inequality and fiscal redistribution in middle-income countries. *Journal of Economic Inequality*, 18(3), 261–282.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics* (9th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Nur Azizah, Astuty, S., Jamil, M., & Rajab, A. (2026). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kualitas manusia dalam menurunkan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal EMT KITA*, 10(1), 125–136.
- OECD. (2018). *A Broken Social Elevator?*. OECD Publishing.

- OECD. (2023). *Income Inequality Update 2023: Rising Inequalities and Policy Responses*. Paris: OECD Publishing.
- Sabina Alkire, & James Foster. (2016). Multidimensional poverty. *Oxford Development Studies*, 44(3), 1–20
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2021). *Economics* (21st ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Sethi, N., & Acharya, D. (2022). Human development and poverty reduction nexus in emerging economies. *Social Indicators Research*, 161(2), 567–589.
- Soko, F. R. I., & Ballo, F. W. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kupang. *Research Journal of Accounting and Business Management*, 7(2), 95–107.
- Sri Endang Rahayu, dkk, (2015), Pengantar Ekonomi Makro, Medan : Perdana Publishing.
- Sri Endang Rahayu, dkk, (2020), Perekonomian Indonesia, Medan : Perdana Publishing.
- United Nations Development Programme. (2024). *Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock*. New York: UNDP.
- Wibowo, A., & Ridha, M. R. (2021). The effect of economic growth, unemployment rate, and human development on poverty in Indonesia: Panel model approach in four poorest provinces. *d'CARTESIAN*, 10(2), 85–94.
- Widiasari, J., Heriberta, H., & Hardiani, H. (2026). The effect of population, human development index, access to proper sanitation, and access to safe drinking water on absolute poverty in Jambi Province. *Jurnal Prajaiswara*, 7(1), 15–29.
- World Bank. (2020). *Indonesia Economic Prospects: The Long Road to Recovery*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2024). *Poverty, Prosperity, and Planet Report 2024: Pathways Out of the Polycrisis*. Washington, DC: World Bank.